

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Penataan Ruang

Izin Usaha Jasa Konstruksi Besar

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 Alamat Pemohon : _____
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 No. Telp : _____

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- Surat permohonan
- Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 - Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 - Kementerian, jika Koperasi
 - Pengadilan Negeri, jika CV
- Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- 1. Izin Gangguan (UUG) atau Surat pernyataan akan mengurus Izin Gangguan (UUG) dalam waktu 1 Tahun bagi yang belum memiliki Izin Gangguan (UUG)
- 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- 3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
- 4. Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 (satu) tahun terakhir
- 5. Izin Usaha Jasa Konstruksi Besar (IUJK Besar) terdahulu [Asli dan fotokopi]
- 6. Kartu Tanda Daftar Usaha atau Perseorangan untuk Jasa Usaha Konstruksi terdahulu [Asli dan fotokopi]

Keterangan Prasyarat

Baru: No. 1-4
 Perpanjangan: No. 1-6
 Perubahan: No. 1-6
 Pencabutan: No. 5-6

Persyaratan :

- 1. Persyaratan Dasar
- 2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku [Fotokopi dan asli]
- 3. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
 - Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan Tenaga (SKT) [Fotokopi]
 - Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Perusahaan [Fotokopi]
 - Foto kantor perusahaan (Papan nama atau plang perusahaan, foto kantor tampak depan, ruang kerja, dan ruang rapat) dicetak berwarna 1 (satu) lembar
 - Pasfoto penanggung jawab
- 4. Bukti pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas kontrak badan usaha [Fotokopi dan asli untuk diperlihatkan kepada petugas]
- 5. Jika menyewa tanah atau bangunan:
 - Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan
 - Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan
 - KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
- 6. Persyaratan tambahan yang terdiri dari:
 - Untuk perubahan alamat:
 - Surat keterangan dari pemilik/pengelola bangunan yang baru yang menyatakan tidak keberatan bangunannya digunakan
 - Untuk perubahan data direksi/pengurus:
 - Surat penunjukkan dari badan usaha kepada direksi baru
 - Daftar riwayat hidup atau CV dari direksi baru
 - Untuk perubahan nama perusahaan:
 - Akta penggantian nama perusahaan dan pengesahannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
 - Untuk perubahan klasifikasi:
 - SBU yang telah diperbaiki
 - Untuk pencabutan:
 - Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN) yang diterbitkan oleh kantor pajak setempat
- 7. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Catatan:

Untuk melengkapi persyaratan, direktur atau penanggung jawab perusahaan harus datang ke kantor PTSP untuk dilakukan pemotretan

Keterangan Persyaratan

Baru: No. 1-3, 5, 7
 Perpanjangan: No. 1-7
 Perubahan: No. 1-7
 Pencabutan: No. 6

Catatan

